

PEKA

MEMAHAMI LEBIH DALAM

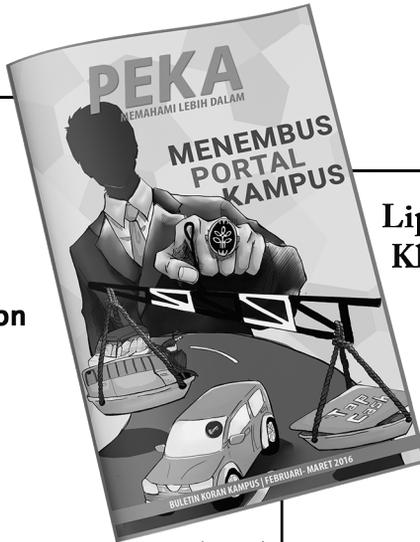
MENEMBUS PORTAL KAMPUS



5 Laporan Utama

Tapcash: Pengemban Tunggal Beban Green Transportation

- 3 Editorial
- 4 Kabar Kampus
- 12 Diploma
- 13 Kemahasiswaan
- 16 Data dan Angka
- 18 Ragam
- 19 Sains dan Teknologi



Liputan Khusus 8

Implementasi Penuh Reaksi

14 Pertanian

Tolak Rokok, Bukan Berarti Anti Tembakau

Pembina: Amiruddin Saleh.

Pimpinan Umum: Nazmi Haddiyat Tamara. **Sekretaris Umum:** Shavira Adlina Pertiwi. **Bendahara Umum:** Gitta Prawidia. **Pemimpin Redaksi:** Ichwanul Aziz Mustaqim. **Pemimpin HRD:** Nita Febriani. **Pemimpin Pusat Data dan Analisis:** Ratna Puspita Haryati. **Pemimpin Marketing and Communication:** Reni Subagdja. **Pimpinan Produksi Cetak:** Shalsa Nurhasanah. **Pimpinan Produksi korpusipb.com:** Muhammad Qomarul Huda. **Redaktur Pelaksana:** Firra Tania. **Redaktur Artistik:** Hanifah Husein. **Redaktur Foto:** Nita Febriani. **Penanggung Jawab Rubrik:** Rully Novianti, Wardiman Jaya, Putri Indah, Ratna Puspita, Ari Bima. **Editor:** Hayah Affah, Nur Azizah Rizki, Melati Fadla. **Kepala Tata Letak:** Samudera Alem Icti.

KORAN KAMPUS
Dengan Pena Menjelat Berita Mengguncang Dunia

Reporter: Shalsa Nurhasanah, Firra Tania, Melati Fadla, Wardiman Jaya, Sifa Fauziah, Reghina Ardhalova, Rully Novianti, Ratna Puspita, Diah Ayu Restanti, Nisa Hasaningtyas, Putri Indah, Ira Widya Zahara, Puput Nurul Utami, Indah Kusuma Effendi, Kuntum Mutia Umami, Ritdza Wilujeng Laigi, Aulya Permatasari, Dary Farah. **Fotografer:** Nita Febriani, Ichwanul AM, Ari Bima Putra, Herlinda Yenti, Andika Surya, Ulfah Dwi Kurniawati, Avina Fitrah. **Kartunis:** Muhammad Qomarul Huda, Latifa Artiningsih, Allice Fajri, Nur Yasin Hidayatullah. **Layouter:** Nazmi Haddiyat Tamara, Hanifah Husein, Intan Nur Fatonah, Samudera Alem, Tsara Nuha Apsari. **Marcomm:** Reni Subagdja, Shavira Adlina Pertiwi, Gita Prawidia, Tria Yuniati, Chaerunnisa, Dony Ferdianto, Dimas Nurhadi

Desain cover: Nazmi Haddiyat Tamara. **Ilustrasi cover:** Allice Fajri.

Penerbit: Koran Kampus IPB. **Percetakan:** PT CS Pro



Perubahan Iklim dan Logika

KORAN KAMPUS



IPB

Topik perubahan iklim mencakup aspek yang sangat luas, manusia sebagai individu tampak cukup kecil bila dibandingkan dengannya. Sangat mudah untuk membuat manusia merasa tidak berdaya. Kemudian, apakah satu orang di tengah tujuh miliar dapat membuat perbedaan?

Jika Anda ingin menggunakan moda transportasi paling bersih, berjalan kaki atau bersepeda adalah jawaban yang menghasilkan nol gas rumah kaca. Selain itu, dilansir dari *National Geographic* edisi November 2015, Anda dapat meninggalkan mobil dua hari seminggu untuk mengurangi 1,8 ton emisi gas rumah kaca per tahun. Lalu, Menurut *Oak Ridge National Laboratory*, bus transit menggunakan energi lebih banyak per penumpang-kilometer daripada mobil. Perhitungan tersebut dapat berubah seiring bergesernya bahan bakar fosil ke listrik. Saat ini tren global transportasi banyak beralih menjadi kereta api, bersepeda, atau berjalan kaki.

Bagi sejumlah kalangan, program *Green Campus* IPB amat menarik. Mereka melihat program ini dari berbagai sudut pandang, seperti lingkungan, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mereka termotivasi untuk mengetahui latar belakang serta turut memberi inovasi pada program ini. Sedangkan, beberapa di antaranya dengan lantang mengibarkan gerakan penolakan.

Program Kampus Hijau di-

gadang-gadang Institut Pertanian Bogor sebagai solusi memecahkan masalah perubahan iklim. Institut memiliki tanggung jawab sebagai wujud percontohan bagi dunia, untuk menunjukkan sebuah miniatur hidup ramah lingkungan. Mahasiswa dilibatkan dalam upaya pengurangan emisi karbon kendaraan bermotor, pola hidup *zero waste*, *green building*, dan *green energy* adalah sebuah tujuan yang mulia untuk melestarikan iklim dunia.

Usaha mengubah pola hidup masyarakat global memang sebuah pekerjaan besar. Membuat satu orang pengendara sepeda motor berpindah menjadi pejalan kaki atau penikmat transportasi publik. Membuat beberapa pihak yang telah lama hidup atas mata pencaharian dari sepeda motor berhenti untuk mencari penghidupan baru. Gelombang penolakan secara masif digelar bukan tanpa alasan. Masalah perut memang tidak bisa begitu saja diabaikan apalagi dengan sebuah alasan perubahan iklim.

Belum lagi implementasi berbayar atas dasar disinsentif. Mahasiswa bahkan masyarakat secara umum akan menempatkan diri dengan sukarela menjadi penentang kebijakan ini, "dulu gratis kenapa sekarang harus bayar".

"Manusia mudah merasa tidak berdaya akibat perubahan iklim adalah aspek yang begitu luas, begitulah yang dipaparkan Bill McKib-

ben seorang penggerek lingkungan hidup, dalam bukunya *The End of Nature* (1989).

Logika manusia akan dibawa berkelana menghinggapi aspek-aspek ekonomis yang dilibatkan dalam upaya mengubah iklim. Gerakan penolakan mungkin saja atas dasar logika sebuah pola hidup ramah lingkungan adalah "lebih murah". Apa jadinya bila ternyata memotong jalur mata pencaharian dan membuat beberapa pihak dirugikan secara materil? Berbagai aksi demonstrasi menjadi hal wajar setelah kita memaknai pertanyaan tersebut. Kita membutuhkan alternatif yang masuk akal untuk membayangkan berbagai versi hidup ramah lingkungan.

Dalam edisi ini, Anda dapat mengkaji latar belakang dibalik berbagai reaksi penolakan atas implementasi *Green Transportation*. Liputan kami berkisar dari sudut pandang pihak penyelenggara, mahasiswa dan masyarakat, serta para pakar yang cukup relevan dengan topik perubahan iklim.

Green Campus memiliki magnet besar bagi kehidupan kampus. Melihat bagaimana tim redaksi Koran Kampus beralih topik dalam kurun waktu dua minggu setelah penentuan isi redaksi. "Semahal itu kah modal untuk melestarikan lingkungan? Tepatkah transportasi yang pertama kali dibenahi dalam memberikan pola pikir hidup ramah lingkungan? Mengapa tidak inovasi sumber daya energi menjadi konsep utama program ini?", adalah beberapa pertanyaan yang perlu ditinjau lagi secara mendalam. Tetap saja, *Green Campus* bukan topik mudah yang dapat diselesaikan beberapa minggu. Perlu kajian serta investigasi mendalam untuk memberikan informasi lengkap seputar proyek besar IPB di 2020 mendatang. Apapun pandangan Anda, kami harap edisi ini bersifat informatif, menghibur, dan yang terpenting, mencakup topik yang memengaruhi kita. Terima kasih karena telah membaca.

Ichwanul AM, Pemimpin Redaksi
Ilustrasi: Nur Yasin & Hanifah H





LGBT: PENYIMPANGAN NORMA DI MASYARAKAT



Maraknya isu mengenai lesbi, gay, bisex, dan transgender (LGBT) di masyarakat menuai berbagai respon. Tak terkecuali bagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Diskusi dan kajian terkait LGBT beberapa kali digelar. Berbagai solusi yang dianggap bisa mencegah penyebarannya terumuskan dalam diskusi terkait.

Meski bukan negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2015 lalu menuai berbagai reaksi dari dunia internasional. Berbagai diskusi terkait LGBT mulai dari penuntutan hak asasi manusia hingga berbagai penolakan terhadap LGBT marak dilakukan.

Isu ini turut ramai digunjingkan di kalangan mahasiswa IPB tempo hari. Tak tinggal diam, BEM KM IPB mencoba mengambil sikap dengan mengajak lembaga dakwah fakultas (LDF) serta organisasi mahasiswa (ormawa) keagamaan untuk mencari solusi.

"LGBT itu menyimpang dari fitrah manusia" ujar lin Solihin, S.Pi, M.Si pembina Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) IPB. Seperti Solihin, Pembina Kemaki IPB, Dr. Ir. Radite Praeko Agus Setiawan, M.Agr juga menyatakan bahwa LGBT adalah sebuah perbuatan yang ditenang dalam keyakinan Katolik.

"LGBT menentang aweg-aweg atau aturan yang ada pada swadharma (kewajiban laki-laki dan perempuan). Karena tidak ada aturan dalam Hindu mengenai pelarangan, kita berpedoman pada aturan tidak tertulis," ucap I Gede Komang Widiyana, ketua KMHD IPB.

Menurut Dhedy Kristianto selaku Ketua KMB IPB, dari diskusi dengan berbagai tokoh Buddha, disepakati bahwa LGBT merupakan karma perbuatan dimasa lampau.

Satu suara, mereka sepakat untuk membantu penyembuhan rekan-rekan LGBT dengan pendekatan keagamaan. Langkah pertama, yaitu pendataan pengidap LGBT di kampus secara pribadi oleh LDF dan ormawa keagamaan. Data yang diperoleh tidak untuk dipub-

likasikan pada khalayak umum.

BEM KM IPB juga mengusulkan adanya lembaga bimbingan konseling kepada pihak rektorat.

"Waktu SMP dan SMA kita ada bimbingan konseling kan? Saya rasa mahasiswa dengan berbagai permasalahan yang kompleks pun perlu bimbingan konseling," tutur Danang Setiawan selaku Presiden Mahasiswa BEM KM IPB.

Dalam wacana, lembaga konseling ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa IPB untuk meringankan beban dengan cara mencurahkan emosi serta mencari solusi bersama-sama konselor dalam berbagai hal.

LGBT dari Perspektif Keilmuan

Kerap kali LGBT divonis sebagai penyakit kejiwaan. Diagnostik and Statistical Manual of Mental Disorder 4th Edition mendefinisikan bahwa seseorang yang sakit jiwa adalah orang yang mengalami penderitaan kejiwaan, menampilkan kinerja yang buruk, dan memiliki hambatan atau ketidakmampuan

bina mereka untuk mengikuti norma yang sudah kita anut," tegas Dr Nurmalia K. Pandjaitan MS. DEA selaku koordinator mata kuliah Psikologi Sosial IPB. Nurmalia juga menambahkan masyarakat harus bijak dan menanggapi dengan kepala dingin.

Pada dasarnya, LGBT berhubungan dengan orientasi sosial seseorang dalam memilih pasangan yang diinginkan. Nurmalia mengatakan bahwa faktor pendorong yang menjadikan seseorang memiliki diorientasi seksual di antaranya: trauma seksual, gaya hidup, serta pola asuh.

Dari sisi psikologi, LGBT dapat disembuhkan lewat terapi dengan terlebih dahulu mengetahui latar belakangnya.

"Jika karena pola asuh, bisa dengan terapi behavior, dengan pendekatan reward dan punishment seperti apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Intinya, pendekatan manusiawi dan holistik. Soal dia bisa sembuh atau tidak itu tergantung niat, keinginan dan keyakinan dia," papar Nurmalia.

Nurmalia menjelaskan bahwa dukungan orang tua dan lingkungan juga sangat penting. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mengambil sikap lewat kebijakannya.

Secara biologis, tidak ada perbedaan antara pengidap homoseksual dengan heteroseksual. Seperti yang diungkapkan salah satu dosen Biologi IPB, Dr Bambang Suryobroto, "Tidak ada bukti langsung yang memperlihatkan adanya hubungan kromosom antar keturunan. Hormon pun berlaku sama saja bagi pengidap LGBT," ucapnya.

“*Hormon pun berlaku sama saja bagi pengidap LGBT*”

- Dr Bambang Suryobroto

dalam berperan di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak semua pengidap LGBT mengalaminya. LGBT bukan pula sebuah penyakit yang menular.

"LGBT itu penyimpangan sosial karena norma masyarakat Indonesia tidak dapat menerimanya sehingga kita perlu mem-

Putri Indah

Tapcash: Pengembalian Tunggal Beban Green Transportation

Ilustrasi Gambar: Andika S

Program Green Transportation (GT) yang dimulai sejak Oktober 2015 lalu itu kini menghangat kembali seiring mulai diterapkannya sistem parkir berbayar dan pemberlakuan sistem portal di beberapa ruas jalan. Kendaraan motor tak boleh lewat jalan yang ditutup portal, diarahkan ke area parkir terpusat seperti GWW, Green TV, Menwa, dan Fakultas Peternakan.

Pelaksanaan pengelolaan transportasi dalam kampus dan parkir sepeda motor diserahkan kepada PT Bogor Life Science and Technology (BLST) sebagai pihak ketiga untuk membantu rektorat IPB mengelola proyek GT. Terhitung sejak 1 Maret 2016, GT dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh mulai dari sistem peminjaman sepeda yang harus menggunakan kartu BNI Tapcash hingga parkir motor yang berbayar. Selain itu, moda transportasi lain seperti mobil listrik (moli) dan bus kampus tak luput dari kebijakan penyesuaian tarif tersebut.

"Sistem bayar satu rupiah itu hanya sebagai pendataan saja," ujar Erick Wahyudyo selaku *Manager Business Development* BLST.

Peminjaman sepeda dikenakan tarif Rp1,00 untuk sekali pakai. Selain sepeda, parkir motor pun dikenakan biaya sebesar Rp500,00, namun kebijakan tersebut tak bertahan lama. Selang 10 hari, pada 10 Maret 2016 biaya parkir kembali di angka Rp1,00 per sekali parkir. Tak hanya itu, layanan transportasi kampus lainnya juga mengalami penyesuaian tarif. Rencananya, terhitung mulai tahun ajaran baru 2016-2017 menurut hasil pertemuan dosen muda dengan Rektor IPB biaya transportasi dalam kam-

pus akan dibebankan pada UKT sebesar Rp600.000,00.

Kebijakan ini akan berdampak pada mayoritas mahasiswa yang memiliki kegiatan di gedung-gedung belakang seperti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan serta Departemen Biologi dan Biokimia sudah barang pasti menjadi objek yang paling sering terkena dampak kebijakan ini di antara mahasiswa lainnya.

Salah satunya adalah Boy, mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan angkatan 50, mengaku jika *Green Transportation* ini memiliki sisi baik dan buruk. Sisi baiknya adalah mampu mendorong mahasiswa untuk berjalan kaki dan berolah raga. "Awalnya saya naik motor, karena ada kebijakan ini sekarang saya mengendarai sepeda," ujarnya sambil menepuk jok sepeda kayuh. Namun, Boy mengeluhkan sistem tarif penggunaan fasilitas kampus seperti bus, mobil listrik, dan penggunaan sepeda. "Di negara asal saya, Malaysia, penggunaan seluruh fasilitas kampus itu gratis, saya harap di sini pun demikian," tambahnya.

Meskipun begitu, kebijakan ini banyak menuai kritik. Hal ini karena tidak ada penyesuaian pengendaraan sepeda motor dan mobil. Namun, dalih keadilan dijawab oleh pihak

rektorat karena setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing.

"Jika keadilan didalilkan dengan sama rasa sama rata, itu bukan hal yang baik. Malah tidak seimbang dengan porsi kebutuhan masing-masing pihak, masa dosen yang sudah tua disuruh berdiri di bus?" ujar Cahyono Tri Wibowo selaku Kepala Biro Umum IPB.

Rencananya mobil yang parkir akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00. Tarif tersebut akan diberlakukan setelah parkir mobil selesai dibangun pada tahun 2020 sehingga pada tahun tersebut program *Green Campus* terlaksana dengan adil dan menyeluruh. Parkiran mobil rencananya akan ditempatkan di sebelah *Teaching Lab* dan belakang kantor UKK.

Ojek kampus yang tersebar di enam titik pangkalan yakni asrama putri, Berlin, BNI, Gymnasium, Perumahan dosen (Perumdos) serta GWW masih beroperasi dan berlalu lalang di lingkungan kampus. Belum ada keputusan tegas dari pihak rektorat terkait ojek tersebut. Pada mulanya pihak IPB menawarkan kerjasama dengan seluruh ojek kampus namun tercatat baru delapan ojek yang bersedia bergabung bersama BLST dari 217 ojek kampus (Maret 2016). Tak gentar merayu,

alasan rendahnya gaji yang ditawarkan pihak IPB kini diatasi dengan menaikkan angka gaji bagi para ojek jika bergabung bersama yakni jika pada tahun 2015 nominalnya sebesar Rp800.000,00 kini meningkat menjadi Rp1.500.000,00 per bulannya. Pekerjaan yang disediakan oleh IPB untuk tukang ojek yaitu supir mobil listrik, kondektur bus DAMRI, teknisi sepeda, sampai penjaga parkir motor. Namun, usulan tersebut masih ditolak ojek kampus dengan alasan upah yang ditawarkan masih rendah.

Hari pertama berlakunya *Green Transportation* secara menyeluruh, ojek melakukan unjuk rasa yang kedua di depan rektorat, namun Kepala Biro Umum menyangkal hal itu.

"Memang terdapat gerombolan tukang ojek yang lewat depan rektorat tetapi langsung pergi keluar lewat pintu belakang IPB. Jika ingin melakukan unjuk rasa, perlu ada surat izin dari kepolisian, dan saya menanyakan mengenai surat tersebut, tapi kata Kapolsek tidak ada." Pak Tri menambahkan jika kekuasaan di IPB bersifat otonom. Jadi, pengelolaan kampus maupun dana pembangunan merupakan hak IPB sepenuhnya, dan

kedaulatan ojek bukan tanggung jawab IPB.

Pemberlakuan sistem berbayar pada parkir motor yang digagas oleh pihak IPB, bertujuan untuk mengurangi arus sepeda motor yang berkeleliran di lingkungan kampus. Kenyataannya, jika mahasiswa tidak menggunakan motor sebagai moda transportasi pribadi dari tempat kost, maka mahasiswa tersebut perlu menggunakan transportasi umum untuk mencapai kampus. Contohnya adalah mahasiswa yang tinggal jauh dari lingkungan kampus seperti Cibanteng Proyek, kurang mendapat akses kendaraan umum seperti angkot. Sehingga motor merupakan satu-satunya kendaraan alternatif yang dapat diandalkan sebagai sarana transportasi untuk mencapai kampus.

Transportasi lain penunjang implementasi GT seperti bus dikenakan tarif sebesar Rp1000,00 serta moli sebesar Rp2000,00 per sekali jalan. Perbedaan tarif ini dikarenakan efisiensi kendaraan tersebut. Bus bisa menampung lebih banyak penumpang dibandingkan dengan mobil listrik.

Menurut Erick, *Manager Business Development* BLST.

mengungkapkan bahwa perbedaan tarif antara bis dan moli tersebut ditetapkan dengan alasan efisiensi kapasitas moda transportasi. "Bus dapat menampung penumpang lebih banyak daripada Moli, sehingga tarifnya lebih murah," tukas Erick.

Namun, pada kenyataannya, mobilitas moli lebih terbatas, dengan kecepatan maksimal 30 km/jam, moli membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kendaraan lain untuk mencapai tujuan. Hal ini berbanding terbalik dengan tarif yang ditetapkan pada moda transportasi ini.

Kartu Segala Bisa Bernama Tapcash

Sejak IPB resmi menggandeng BNI sebagai mitra dalam pengembangan program *Green Campus*, uang elektronik BNI Tapcash menjadi satu-satunya alat tukar yang digunakan mahasiswa IPB untuk menikmati fasilitas *Green Transportation* seperti Bus DAMRI, moli, sepeda dan juga parkir motor.

Uang elektronik BNI Tapcash belakangan menjadi kartu segala bisa bagi mahasiswa IPB. Hampir seluruh fasilitas umum penunjang GT yang ada di kampus IPB hanya dapat

Foto: Avina

Tapcash merupakan satu-satunya moda pembayaran *Green Transportation*.





Terhitung 1 Maret 2016 fasilitas *Green Transportation* resmi berbayar.

Foto: Ulfah

diakses dengan *Tapcash*. Kartu elektronik pengganti uang kartal itu bisa berfungsi sebagai alat pembayaran seperti di bus DAMRI dan mobil listrik, maupun hanya sebagai alat pendataan seperti yang diterapkan pada shelter peminjaman sepeda dan parkir motor.

Untuk mendapatkan kartu ini, IPB secara khusus menunjuk Agrimart 1 dan 2 sebagai tempat yang menyediakan kartu ini secara gratis, artinya dengan membayar Rp10.000,00 kartu tersebut telah terisi saldo sebesar Rp10.000,00. Selain itu, kartu ini bisa juga didapatkan di BNI, namun dengan harga yang berbeda yakni Rp20.000,00 tanpa terisi saldo. Isi ulang (*top up*) bisa dilakukan melalui ATM BNI dan juga *customer service* di Bank BNI cabang manapun. Hal ini secara tidak langsung menyaratkan mahasiswa IPB untuk memiliki rekening BNI agar bisa mengisi ulang kartu *Tapcash* mereka.

Penggunaan *Tapcash* ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kerusakan pada kartu *tapcash* saat transaksi berlangsung. Apabila mahasiswa mengalami kerusakan pada kartu *tapcash* miliknya, petugas akan merekomendasikan si pemilik kartu untuk segera menghubungi *customer service* di Bank BNI terdekat, "Nanti kartunya di reset sama pihak bank, tapi sal-

donya tidak akan hilang", jelas petugas yang berjaga di pintu parkir GWW. Berbeda dengan pernyataan tersebut, Nanda – mahasiswi Departemen SKPM, menuturkan bahwa ia pernah mengalami kerusakan pada *Tapcash* miliknya, namun saat menemui *customer service* kenyataannya tidak sesederhana itu, Nanda justru diminta untuk membeli kartu *Tapcash* yang baru.

Sedangkan, *Tapcash* miliknya yang lama tidak dapat digunakan lagi. "Saat saya ke Bank, uang dalam *Tapcash* dikembalikan ke rekening dan itupun membutuhkan waktu sebulan" ungkap Nanda.

Sampai saat ini belum ada alternatif lain yang disediakan IPB untuk mengatasi kasus rusaknya *tapcash*. Semua kerusakan hanya bisa diperbaiki di kantor Bank BNI.

Sejak diterapkan kebijakan GT secara menyeluruh per tanggal 1 Maret 2016, mahasiswa yang menggunakan fasilitas penunjang GT diwajibkan mempunyai kartu BNI *Tapcash*

untuk transaksi pembayaran. Sedangkan, mahasiswa yang masih belum mempunyai *tapcash* akan didata dengan menuliskan nama dan NIM. Untuk parkir motor, selain pengendara dimintai data nama dan NIM, pengendara motor juga harus menunjukkan STNK dan KTM sebelum diperbolehkan keluar dari tempat parkir.

Jika penggunaan *tapcash* ini hanya bertujuan untuk pendataan pada implementasi GT, maka lebih baik menggunakan kartu pengenal IPB. Hal itu karena memungkinkan semua civitas IPB memiliki kartu pengenal dan dapat pula mengurangi pihak luar yang memakai fasilitas kampus. "kalau mau di data, lebih baik pake KTM aja, sama kaya pas masuk LSI. Jadi gausah ribet beli *tapcash*" ujar Fahmi-Mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Berbagai masalah yang timbul pada tahap implementasi *Green Campus*, khususnya *Green Transportation* ini menyiratkan bahwa kebijakan ini masih kurang matang dan perlu dikaji lebih dalam.

“
Jika keadilan
didalikan dengan
sama rasa sama rata,
itu bukan hal
yang baik.”



Nazmi Haddyat Tamara
STK 50 / FMIPA



Putri Indah T
EKS 51 / FEM

Implementasi Penuh Reaksi



Implementasi Green Campus yang sejak awal akan direalisasikan pada September 2015 lalu akhirnya mengalami pemunduran. Program Green Campus ini dirasa belum matang, sehingga Program ini baru mulai berjalan pada Oktober 2015. Namun salah satu elemen Green Campus, yakni Green Transportation yang diterapkan oleh IPB memicu banyak penolakan dari beberapa pihak.

Sejak diterapkannya program GT, Rektor IPB Prof. Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc memang ingin melakukan pembatasan kendaraan untuk masuk ke dalam kampus. Namun setelah kurang lebih enam bulan program ini berjalan, pembatasan kendaraan justru hanya memusat pada pembatasan sepeda motor.

Terhitung sejak bulan Mei hingga September, IPB telah membangun infrastruktur tempat parkir terpusat yang berada di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW), Resimen mahasiswa (Menwa), Fakultas Peternakan serta Green TV. Tempat parkir ini diharapkan menjadi tempat parkir terpusat bagi kendaraan yang masuk ke wilayah IPB, namun kenyataannya hanya diberlakukan untuk kendaraan sepeda motor.

Berbagai kebijakan terkait GT pun mulai bermunculan. Setelah penerapan GT mulai berjalan dan mulai ada pemberlakuan tarif berbayar Rp 1,- dari fasilitas GC seperti tempat parkir terpusat, bus kampus serta mobil listrik. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak rektorat kembali muncul, yakni tarif berbayar fasilitas *green campus* tidak lagi Rp 1,-

Kebijakan penyesuaian

tarif berbayar fasilitas penunjang GT, yang diberlakukan oleh pihak IPB sejak Maret 2016 yaitu tarif parkir motor di parkir terpusat (GWW, Menwa, Fapet, dan Green TV) sebesar Rp 500,- tarif penggunaan Bus untuk sekali perjalanan sebesar Rp 1000, dan Rp 2000 untuk sekali perjalanan penggunaan mobil listrik. Tak hanya itu, IPB juga membangun 5 portal di beberapa titik yaitu Fakultas Peternakan, Menwa dan Fakultas Kehutanan dekat *Common Class Room* (CCR), serta terdapat dua portal di GWW. Titik ini membuat pengendara sepeda motor dibatasi dan tidak diperbolehkan untuk melintas.

Kebijakan baru itu tentu saja menuai kritik dan tanggapan dari berbagai pihak, berbagai aksi mulai dilancarkan oleh BEM Fakultas dan BEM KM IPB. Aksi dan tanggapan yang dilakukan oleh mahasiswa, jajarannya dosen muda serta masyarakat sekitar lingkaran kampus IPB terkait penolakan GT ini, menitikberatkan pada sistem

pelaksanaan GT yang dilayangkan ke pihak rektorat.

Kebijakan GT ini dirasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini karena, pembatasan kendaraan hanya berpusat kepada pengguna sepeda motor, sedangkan pengguna kendaraan roda empat masih diperbolehkan parkir diluar tempat parkir terpusat. Implementasi GC menuju 2020 yang kurang matang ini membuat massa menilai bahwa ada ketidaksiapan IPB dan ketidakjelasan Surat Keputusan (SK) Rektor terkait Implementasi GT.

Implementasi GT juga ikut dirasakan oleh warga lingkaran kampus IPB, mereka menilai penutupan portal justru membuat pemasukan ojek berkurang. Meskipun sudah ada pelarangan ojek untuk beroperasi di Kampus, namun sebelumnya ojek telah

“

Kebijakan Green Transportation ini dirasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

”

ditawarkan untuk bekerja oleh pihak Bogor Life Science Tech (BLST) dengan gaji sebesar Rp 1,5 juta. Namun ojek merasa gaji yang ditawarkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga lingkaran kampus juga menyuarakan aspirasinya untuk menolak GT ini meminta keadilan dari



pihak Rektorat.

Surni, Kepala Ojek Asrama mengaku sebelumnya perwakilan ojek dipanggil untuk berbicara dengan pihak rektorat namun pihak rektorat hanya memberikan janji untuk memperkerjakan ojek tanpa syarat di IPB. Terhitung mulai bulan April mendatang, ojek akan dilarang untuk beroperasi di dalam kampus karena akan dikeluarkan SK Rektor mengenai pelarangan parkir liar kendaraan roda dua dan roda empat.

Erick Wahyudiono selaku pihak BLST pelaksana program GT menyampaikan bahwa pihak rektorat ingin pelaksanaan program ini dapat berjalan secara semestinya. Sehingga untuk mendapat pencapaian sistem yang baik perlu dilakukan perbaikan sistem. Perbaikan sistem tersebut salah satunya adalah perbaikan sistem ojek dalam kampus.

"Rektorat tidak pernah melakukan penghapusan ojek. Kita hanya memperbaiki sistem transportasi di dalam kampus" ungkap Erick saat ditanya mengenai rumor penghapusan ojek.

Ia mengaku Program GT ini hanya mengurangi luas area untuk roda dua. Rencananya area Green Tv hanya boleh dilewati oleh dosen, mahasiswa, pegawai dan tamu. Nasib para ojek juga telah ditanggulangi oleh pihak BLST. Sebelumnya telah dilakukan pendekatan terhadap tukang ojek dengan melakukan pertemuan dengan Perwakilan ojek. Tawaran kepada ojek untuk bekerja di IPB

tanpa syarat menjadi pegawai IPB menghasilkan 69 orang yang telah bergabung menjadi pegawai IPB.

Dampak hilangnya keberadaan ojek dalam kampus pun dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Peternakan, Oktavia Ayu Riwayanti. Ia mengaku keberatan jika ojek tidak ada, karena fakultasnya berada di wilayah belakang IPB sedangkan ia harus mengejar waktu untuk sampai di kelas. "Soalnya saat terburu-buru kalau pakai bis dan mobil listrik harus antri dan lambat. Sedangkan kalau pulang malam ga ada ojek, tebengan pun susah" tutur Oktavia.

Setelah aksi demo yang dilancarkan oleh mahasiswa, pihak Rektorat membuat kebijakan baru yaitu menurunkan kembali biaya parkir menjadi Rp 1,-. Pihak BLST mengaku ingin membuktikan bahwa program itu tidak memiliki niat untuk komersialisasi. Perbedaan harga untuk mobil listrik dan bus dijawab dengan mempertimbangan mengenai keefektifan pengangkutan dan waktu. Mobil listrik hanya ditujukan pada waktu tidak sibuk.

Audiensi yang dilakukan pihak BEM dan pihak Rektorat setelah melakukan aksi menghasilkan beberapa point penting untuk mengawal implementasi *Green Campus* 2020.

"*Green campus* kita setuju, yang kita belum setuju selama implementasi yang meresahkan. Hasil dari audiensi sudah kita sampaikan. Yang kita bangun saat ini bukan masalah setuju atau tidak

setuju namun lebih baik saling melengkapi dalam hal positif. Pada dasarnya program ini bagus hanya saja kurang lengkap dengan implementasi dan sosialisasi yang kurang. Oleh karena itu kita kawal sampai BEM KM selanjutnya hingga 2020. Penolakan *Green Transportation* kemarin adalah salah satu kawalan kami jika implementasi yang kurang masuk ke mahasiswa" tutur Danang Setiawan, Ketua BEM KM IPB.

Menurut Danang, Idealnya GT adalah adanya sosialisasi secara berkala jika ada kebijakan yang baru. "karena jika gagal di sosialisasi maka gagal juga di implementasi" ungkap Danang

Terkait kebijakan penurunan tarif berbayar fasilitas GT Danang mengaku tidak dapat memastikan karena tergantung pendapatan IPB "Jika kenaikan tarif masih rasional dan untuk kebaikan IPB kenapa tidak" tutur Danang.

Berdasarkan penilaian dari aspek kelayakan Ekonomi, IPB telah memberikan *multiplier effect* dalam bentuk "dampak tidak langsung" (indirect benefit) karena memberi kontribusi pada pendapatan masyarakat sekitar kampus dan memberi lapangan kerja bagi para ojek untuk beroperasi di kampus. Namun multiplier effect ini akan dibatasi dengan adanya program *Green Campus*. *Multiplier effect* adalah kegiatan yang dapat memicu timbulnya kegiatan lain, IPB selaku universitas akan menggerakkan usaha lain oleh masyarakat sekitar kampus sebagai pendukungnya, kegiatan ini dapat berupa tempat kosan, tempat makan, laundry, angkot dan ojek.



Shalsa Nurhasanah
AGFM 50 / FMIPA



Ratna Puspita
INTP 51 / FAPET



MEDIA PARTNER ADVERTISING SPONSORSHIP

klik: _____
marketing.korpusipb.com

CP : 0856 9854 265 (Reni)

KORAN
KAMPUS
IPB



@korpusipb

FIND US ON LINE@



www.korpusipb.com

   @KORPUSIPB

epaper.korpusipb.com
marketing.korpusipb.com
redaksi@korpusipb.com

**MENERIMA JASA PEMBUATAN:
KAOS/KEMEJA/JAKET/TAS/SELEMPANG WISUDA/DLL**

BIDIK KONVEKSI

 28844EBE  BOGORCLOTHING
 8878-7286-7156

Kp. Babakan Lio No. 26 Dramaga, Bogor - Jawa Barat
e-mail : bidikkonveksi@gmail.com



 **OFFICIAL PARTNER**
MPKMB 55 SI & 03 IPB
BAGIAN VENDOR TIPU-TIPU

FASILITAS

-  • 96 Unit Kamar Nyaman & Sehat
-  • Mushola
-  • Air Conditioner
-  • Free WIFI
-  • Fully Furnished
-  • Televisi
-  • LED Light & Emergency Lamp
-  • Back Up Electricity Power Supply
-  • APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
-  • Laundry Service
-  • Cafeteria/Kantin Sehat
-  • Mini Market
-  • Toko ATK & Foto Copy
-  • Sistem Keamanan 24 Jam
-  • Akses Pintu utama Menggunakan "Fingerprint"
-  • Air PDAM & Sumur Bor
-  • Salon Mahasiswa (Hairdressing & Make up)
-  • Kamar Mandi masing2 dalam Kamar
-  • CCTV pada tiap Koridor
-  • Parkirng Area Motor & Mobil



ISO 9001:2008 (Cert. No. 1016QEN05)

 Providing Housing & Estate Management

HARGA SEWA
 EKONOMIS
 SIAP HUNI
 MARET 2016



ISO 9001:2008

Certificate of Registration
 This is to certify that
 Quality Management System of
PURI GARDENIA
 PT. PERWIRA NO. 10 BABAKAN, DRAMAGA KABUPATEN BOGOR 16680, JAWA BARAT
 has been assessed and found to conform to the requirements of
ISO 9001:2008
 as follows:
 PROVIDER'S BUSINESS AND ESTATE MANAGEMENT
 Issued On: 12/08/2014
 Valid Until: 12/08/2016
 IAF
 BSI

PAYMENT

Pembayaran Tanda Jadi (Rp. 3.000.000) maupun Sewa Tahunan dilakukan melalui transfer Bank sbb :


mandiri
 RENI HEVIANDRI RIANDARINI
 Acc. No. 167 0000 527 811


BCA
 RENI HEVIANDRI RIANDARINI
 Acc. No. 740 029 4423


 WhatsApp: 0818 151 699/0821 1131 9853
 atau 
PIN : 7655BC6D atau
E-mail : renisuko@gmail.com



Reni : 0818 151 699
Dio : 0878 7082 5783
renisuko@gmail.com
sukopnk@gmail.com



Jl. Perwira No. 10, Babakan, Dramaga
 Kabupaten Bogor 16680, Jawa Barat

HARI BATIK DIPLOMA: UPAYA LESTARIKAN BUDAYA BANGSA



Setiap hari Rabu civitas akademika Diploma IPB dituntut untuk mengenakan batik saat kegiatan perkuliahan. Hari Batik ini diusung oleh BEM Diploma IPB. Roni Permana, Ketua BEM Diploma IPB, mengatakan bahwa program ini diadakan untuk melestarikan budaya yang dimiliki Indonesia.

Program Hari Batik Diploma masih dalam tahap sosialisasi, sehingga masih banyak mahasiswa Diploma IPB yang belum mengenakan batik. Sosialisasi yang dilakukan pihak BEM Diploma berupa broadcast di setiap grup Program Keahlian (PK) di Diploma.

"Pesan broadcast yang saya terima agak membingungkan, karena tidak jelas darimana pesan tersebut berasal dan hanya menyuruh kita untuk mengenakan batik," ujar Selly, mahasiswa Komunikasi Diploma IPB.

Kabinet Aksi Reaksi BEM Diploma IPB saat ini hanyalah meneruskan rencana dari kabinet sebelumnya yang telah mencanangkan program ini. Pasalnya BEM J juga akan bergerak bersama BEM KM IPB untuk menjalankan program Rabu Nyuntik (Nyunda Batik). Pihak BEM pun selanjutnya akan mendiskusikan bersama pihak Institusi untuk kebijakan program ini.

Hari Batik bukan hal yang baru untuk Diploma IPB karena ada beberapa PK yang su-

dah memiliki Hari Batik sebelum adanya program dari BEM ini. Ada enam PK yang sudah menjalankan Hari Batik, yaitu Teknologi Produksi dan Manajemen Industri Perikanan Budidaya (IKN), Analisis Kimia (ANKIM), Supervisor Jaminan Mutu Pangan (SJMP), Manajemen Industri (MNI), Manajemen Agribisnis (MAB), dan Teknik Industri Benih (TIB).

Ada berbagai faktor yang membuat mahasiswa belum mengenakan batik, seperti belum adanya peraturan yang mewajibkan mengenakan batik dari institusi dan ada beberapa mahasiswa yang tidak memiliki baju batik formal.

"Saya tidak memiliki baju batik yang formal. Jika ada Rabu Batik, kenapa tidak diberikan seragam batik saja dari institusi?" ujar Syifa, mahasiswa Komunikasi Diploma IPB.

Roni menyatakan bahwa harapan dari BEM mengadakan Rabu Batik ini hanya satu, membuat mahasiswa mencintai budaya negerinya sendiri. Harapan dari BEM dengan kenyataan mahasiswa mengenakan batik

nampak belum sinergis. Catur, Mahasiswa Teknik dan Manajemen Lingkungan, mengatakan bahwa ia menggunakan batik karena takut akan terkena Komisi Disiplin (Komdis) dan bukan karena kesadaran untuk melestarikan budaya Indonesia.

Herlinda Yenti
Ilustrasi: **Latifa Artining-sih**



Kuliah Kerja Nyata 2016, ubah Nama mengubah Makna

Kuliah Kerja Nyata-Profesi (KKN-P) kini berubah nama menjadi Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T). Perubahan ini berawal dari sambutan rektor IPB saat pembukaan lokakarya KKN-P tahun lalu. Perubahan nama ini diharapkan agar semua departemen di IPB dapat melakukan KKN tanpa terkendala profesi masing-masing.

Menanggapi hal tersebut Dr Ir Ninuk Purnaningsih M.Si selaku dosen pembimbing KKN-Tematik dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema) setuju dengan keputusan tersebut.

“Tujuan dari KKN itu sendiri adalah kerja multidisiplin untuk menemukan potensi, masalah, dan solusi bersama-sama lintas ilmu berdasarkan profesi yang dimiliki, jika P-Profesi di khawatirkan masing-masing mahasiswa hanya berfokus pada profesinya masing-masing. Harapannya dengan Tematik, terbentuklah kelompok kerja untuk bersama-sama membangun tema dan desa,” tuturnya.

KKN-T sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa fakultas, seperti Fem, Fema, Fapet, dan Faperta. Namun, Prof. Dr. Ir Herry Suhardiyanto, M.Sc selaku rektor IPB mengharapakan pada tahun 2016 ini seluruh departemen

dapat melaksanakan KKN-T tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu produk dari Tri Dharma IPB yaitu pengabdian masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, SK rektor mengenai kewajiban seluruh departemen melaksanakan KKN-T belum turun.

Fakultas-fakultas yang sudah melaksanakan KKN-T akan tetap meneruskan kegiatan tersebut pada tahun ini. Begitu pula dengan Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas MIPA yang akan bergabung pada tahun 2016 ini. Sedangkan beberapa fakultas masih dalam proses persetujuan.

Lokasi pelaksanaan KKN-T akan ditentukan oleh masing-masing fakultas dan departemen. Misalnya saja pada Fema, fakultas ini memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk memilih tiga lokasi yang diinginkan untuk praktik KKN-T, namun semua keputusan-

nya akan diserahkan pada koordinator. Koordinator pada akhirnya akan menentukan lokasi KKN-T yang terdekat dengan tempat tinggal mahasiswa.

“Beberapa orang mengatakan bahwa mahasiswa IPB jarang mau kembali ke desa, pemilihan lokasi kerja selalu di kota, jika mahasiswa di perhatikan realita di desa harapannya mereka memiliki kontribusi yang cukup besar, utamanya di bidang pertanian,” Ujar Mahmudi Siwi M.Si, selaku dosen.

Pelaksanaan KKN-T ini memerlukan persiapan yang matang. Mahasiswa perlu mempersiapkan kekompakan tim, mental, dan fisik untuk pengabdiannya kepada masyarakat. Sehingga akan dilaksanakan pada sesi ujian akhir.

Indah Kusuma E
Infografis: Hanifah Husein



TOLAK ROKOK BUKAN BERARTI ANTI TEMBAKAU

Usulan DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) pertembakauan yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 pada Januari 2016 lalu, menyedot perhatian dari banyak pihak. RUU prioritas Prolegnas 2016, bersama dengan RUU KPK ini, secara garis besar berisi tentang rencana pembatasan impor tembakau untuk industri rokok hingga maksimal 20%, serta pengenaan cukai tiga kali lipat bagi rokok yang menggunakan tembakau impor.

Sebelumnya, RUU ini ditanggapi negatif oleh komunitas anti rokok dan tembakau, seperti *Smoke Free Agent (SFA)*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBI). Alasan yang dikemukakan oleh organisasi tersebut untuk menolak serupa. Mereka men-

duga bahwa RUU tersebut hanya instrumen bagi produsen rokok untuk tetap eksis, meningkatkan produksi, serta menjerumuskan generasi muda Indonesia pada kebiasaan merokok.

Padahal menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2013, jumlah perokok aktif yang merokok setiap hari di Indonesia sudah mencapai angka 48.400.332 jiwa. Dengan jumlah tersebut, apabila diasumsikan harga rokok per bungkus adalah Rp 12.500,00, maka perokok aktif di Indonesia sudah membakar uangnya untuk rokok sebesar Rp 605 miliar rupiah setiap hari.

Kebiasaan merokok selain memberikan dampak negatif pada kesehatan, dimana 20% angka kematian global dinyatakan sebagai akibat merokok, juga dapat menuntun pada kemiskinan. Kemiskinan tersebut disebabkan penghasilan yang

diperoleh sebagian digunakan untuk membeli rokok, bukan digunakan untuk perbaikan kualitas hidup, serta hilangnya produktivitas karena sakit akibat merokok.

Namun, alasan tersebut ditanggapi lain oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR, seperti yang dikutip dari CNN Indonesia. Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Soebagyo, menyatakan bahwa RUU ini merupakan kebijakan yang tepat, karena mendukung penggunaan tembakau dalam negeri dan melindungi petani, serta bukan kepentingan produsen rokok. Hal ini berdasarkan dari data Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015, yang menyatakan bahwa 98% dari 200 ribu hektar lebih perkebunan tembakau adalah perkebunan milik rakyat dengan jumlah petani yang mencapai lebih dari 527 ribu jiwa.

Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) pun berpendapat bahwa RUU ini malah dapat menghambat kemajuan industri rokok yang banyak menyumbang penghasilan negara, yakni sekitar 200 triliun rupiah per tahun. Penghambatan kemajuan industri rokok tersebut dikarenakan jumlah tembakau dalam negeri belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas untuk industri rokok.

Permasalahan rokok di Indonesia, menurut Dr. Ir. Purwono, MS dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura,



sumber: flickr.com
Fotografer :Héctor Izzo Mendoza

tidak terlepas dari dilema di antara melindungi petani tembakau dan generasi muda dari bahaya merokok. Sehingga, menurut Dr. Puwono, tindakan menolak rokok tersebut tidak tepat jika diiringi dengan sikap anti terhadap tembakau. "Sebaiknya kalau memang rokok itu akan dikurangi, jangan sampai mengorbankan petani tembakau," katanya.

Solusi masalah ini, menurutnya, dapat diatasi dengan memperbaiki kualitas tembakau yang ada sehingga sesuai dengan kriteria pabrik rokok, mengganti tembakau yang ada dengan komoditas lain, serta melakukan penelitian tentang manfaat lain tembakau. "Kalau kita melakukan suatu kebijakan disini, kebijakan lainnya harus diperbaiki. Cukainya yang kurang ditambah dari mana? Pemerintah harus mencari sumber lain yang bisa mendatangkan pemasukan untuk negara," tegas Dr. Purwono.

Namun, penggantian tembakau menjadi komoditas lain dirasa masih belum memungkinkan. Hal ini dikarenakan tidak semua lahan yang digunakan untuk menanam tembakau cocok untuk ditanami komoditas lain. Selain itu pemerintah harus berani menjamin adanya pembeli jika petani tembakau mengganti komoditasnya. "Kalau tembakau kan ada pembelinya meskipun harganya fluktuatif sekali," tutur Dr. Purwono.

Sehingga solusi lainnya yakni, mencari manfaat lain tembakau dirasa paling memungkinkan apabila Indonesia benar-benar ingin mengurangi konsumsi rokok penduduknya, dengan tidak mengabaikan kesejahteraan petani tembakau. Penelitian mengenai manfaat lain tembakau, seperti yang dilaku-

kan oleh IPB, UGM, dan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa tembakau mempunyai potensi untuk dijadikan biopestisida dan zat anti korosif.

Penelitian tersebut didukung oleh fakta bahwa tembakau mampu menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat dijadikan pestisida yang

itu kan tanaman rakyat. Karena menganggap rokok itu makruh, maka tanamannya juga," tuturnya.

Mundurinya kemajuan penelitian tembakau seolah dihambat dengan kontroversi rokok di Indonesia. "Kita ribut masalah menghambat rokok. Tetapi rokok yang ada, tem-



Sumber: flickr.com
Fotografer: Hao Dihn

murah dan ramah lingkungan. Selain itu, nikotin yang terdapat di tembakau mengandung gugus atom nitrogen yang dapat menyumbangkan pasangan elektron bebasnya pada logam, sehingga membentuk senyawa kompleks yang dapat menghambat proses korosi besi.

Namun, sayangnya meski berpotensi demikian, penggunaan tembakau untuk kedua hal diatas belum dapat menutupi keseluruhan produksi tembakau Indonesia. Belum adanya perusahaan besar yang membuat biopestisida dari tembakau di Indonesia menurut Dr. Purwono, kurang lebih disebabkan kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak mengurus komoditas ini secara serius dan kurang mendukung penelitian lebih lanjut mengenai itu. "Padahal

bakaunya juga sebagian impor," kata Dr. Puwono. Bahkan Balai Penelitian Serat dan Tembakau (Balitis) sudah tidak meneliti tembakau dari pemerintah. Penelitian tersebut tidak hanya tentang manfaat lain tembakau saja, melainkan juga mengenai peningkatan kualitas tembakau lokal. Perguruan tinggi, juga menurutnya, harus mempunyai otonomi dengan tidak terbawa arus dan tetap melakukan studi serta penelitian tentang tembakau. "Harus dibedakan tembakau dengan rokok. Tembakau bisa digunakan untuk produk lain yang bermanfaat," tutup Dr. Purwono.

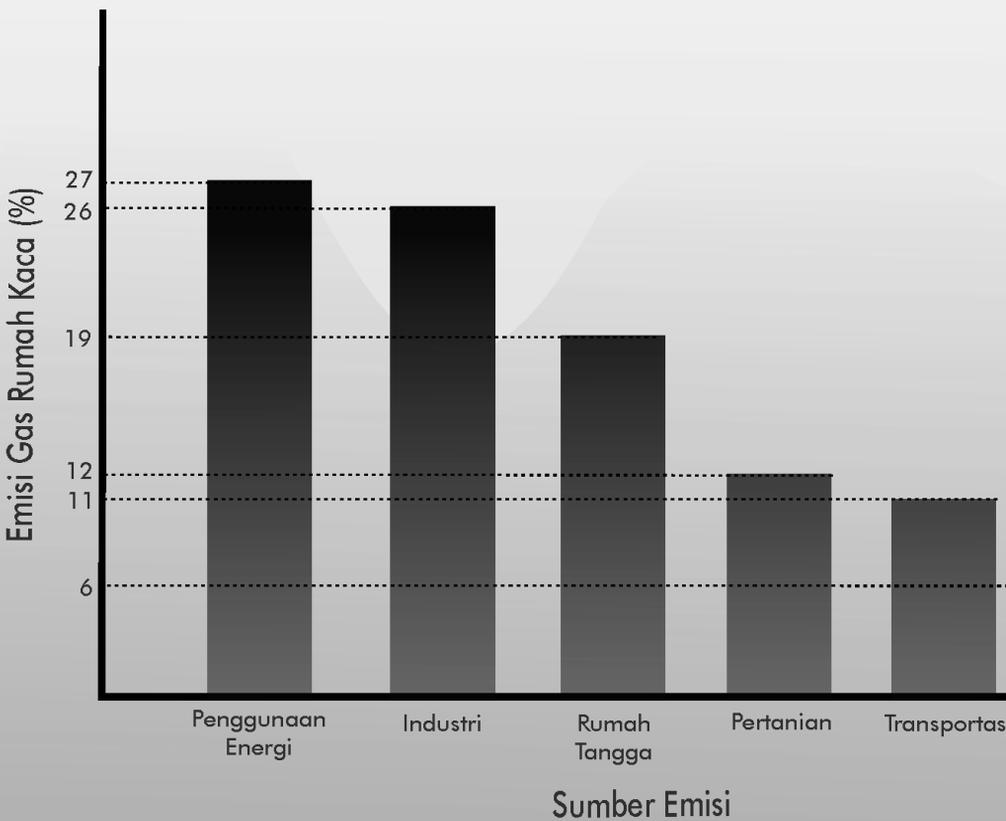


Firra Tania
AGH 50 / FAPERTA

TEMPERATUR RATA-RATA BUMI MENI

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) bumi telah 0.85°C dalam waktu 130 tahun.

Data 21st session UNFCCC (*United Framework Convention on*



Pada 30 November hingga 11 Desember 2015 di Le Bourget, Paris diha *Conferecy of the Parties (COP) UNFCCC* yang ke-21 yaitu men
 kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C untuk menekan emisi gas

TINGKAT KEHIDUPAN BUMI TERANCAM

PUNAH

menghangat sebesar

AKIBAT PEMANASAN GLOBAL

(Climate Change)



Kutub es mencair



Kenaikan muka air laut



Ketersediaan air bersih berkurang



Perubahan cuaca ekstrem



silkan kesepakatan
yepakati batas
s rumah kaca.

Tips Beauty

Berpenampilan cantik dan menawan memang menjadi salah satu tuntutan bagi kaum wanita untuk menunjang penampilannya sehari-hari. Selain menggunakan pakaian yang sesuai, *makeup* sangat perlu agar penampilan menjadi lebih menarik. Namun seringkali banyak wanita yang terkadang merasa bingung menggunakan *makeup* ketika akan pergi ke kampus.

Padahal, banyak trik *makeup* yang bisa diaplikasikan oleh wanita supaya bisa tetap tampil segar, tanpa harus terlihat menor. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik *makeup* minimalis atau natural. *Makeup* minimalis dapat memberikan efek segar dan fresh. Berikut beberapa langkah *makeup* minimalis yang dapat anda gunakan.

1. Langkah pertama untuk cara *makeup* minimalis yaitu mengetahui terlebih dahulu bentuk wajah dan jenis kulit anda
2. Sebelum memberi polesan *makeup* pada wajah, bersihkan terlebih dulu dengan sabun pembersih, selain pembersih wajah, bisa juga memakai *milk cleanser* dan toner untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kulit wajah.
3. Selanjutnya pelembab atau bisa gunakan *BB cream* yang cocok dengan jenis kulit dan warna kulit kita, jerutuk yang memiliki masalah jerawat lebih baik gunakan *concealer* untuk menutupinya. Sesuaikan juga warna bedak yang akan digunakan, baik itu bedak tabur atau bedak padat. Namun jika anda memiliki kulit berminyak, maka pilihlah bedak tabur dapat mengurangi kadar minyak di wajah.
4. Hindari menggunakan *eye shadow* dengan warna gelap. Cukup dengan menggunakan warna

terang dan *soft* seperti pink, coklat muda dan peach.

5. Pakailah *eyeliner* dengan cara menarik kulit mata dengan 1 ujung jari, lalu mulailah mengaplikasikan *eyeliner* dari bagian dalam mata hingga ke bagian ujung luar mata.
6. Pakailah *blush on* dengan warna-warna lembut seperti *pink*, *orange* dan *peach*. Agar pipi terlihat lebih minimalis dan natural.
7. *The last, lipstick*. *Lipstick* akan menyempurnakan tampilanmu. Selain itu produk untuk bibir ini banyak jenisnya mulai *lip balm*, *lip butter*, *lip gloss* sampai *lip tint*. Tinggal pilih yang mana sesuai dengan kebutuhanmu. Jangan lupa pilih warna yang cocok untukmu juga.



Penulis

Nama : Gesha Kalista

TTL : Sukabumi, 26 Sept 1989

Email : gesha.kalista@pti-cosmetics.com

Aktivitas: Tim promosi Wardah Cosmetics



Bicara Ketika Dunia Bungkam



Rating: 8.2/10

Genre: Biografi, Drama

Sutradara/ Penulis:

Tom McCarthy/ Josh Singer

Pemain:

Rachel McAdams, Liev Schreiber, Liev Schreiber, Michael Keaton, Stanley Tucci, Billy Crudup, John Slattery

Durasi: 128 Menit

Rilis : 6 November 2015

Kini Tom Mc Carthy menyuguhkan kisah nyata mengenai tim investigasi *spotlight* di Koran Boston yang merupakan koran harian lokal Amerika Serikat. Tim ini mendapat tugas dari editor baru - Marty Baron (Liev Schreiber) untuk melakukan penyelidikan mengenai pelece-

han seksual yang dilakukan Pastor Gereja Katolik kepada anak di bawah umur. Penyelidikan yang dilakukan selama setahun ini menyingkap fakta setelah selama bertahun-tahun lamanya ditutupi oleh media, polisi, sistem hukum pemerintahan Boston, hingga tingkat tertinggi gereja katolik.

Film yang diarahkan oleh Tom McCarthy ini menunjukkan bagaimana cara kerja sesungguhnya di dunia jurnalistik. Salah satunya yaitu dengan kerja tim yang solid untuk mendapatkan hasil pencapaian yang maksimal. Upaya tim investigasi *spotlight* berisikan editor dan wartawan Walter V. Robinson (Michael Keaton), Michael Rezendes (Mark Ruffalo), Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), dan Matty Carroll (Brian d'Arcy James), yang mencoba melihat, menggali, dan mengungkapkan informasi dari tuduhan pelecehan tersebut.

Tom ingin menyampaikan bahwa seorang jurnalis pun juga harus dituntut berani menyuarakan kebenaran dan mengungkapkan

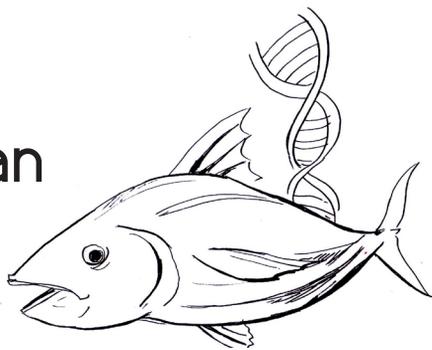
fakta ke publik. Meskipun dalam proses kinerja Tim Spotlight yang kuat tidak jarang banyak menghadapi kesulitan. Namun pada akhirnya kerja keras mereka dalam mempublikasikan kasus itu dalam headline Koran Boston Globe yang bertuliskan "*Church allowed abuse by priest for years*," membuahkan *Pulitzer Prize for Public Service* pada tahun 2003.

Film ini dikemas dengan sederhana, namun menjelang konflik dalam isi cerita pemain dihadapkan pada satu masalah karena tidak dapat menemukan dokumen yang menjadi kunci kasus tersebut mengenai pelecehan yang dilakukan pastor serta beberapa pihak yang tidak ingin mengungkapkan kebenaran dari kasus tersebut.

Meskipun isi informasi dari topik cerita terkesan sangat berat, namun film ini berakhir dengan kesan yang apik dan cocok untuk ditonton oleh untuk pecinta film drama dan biografi.

Shalsa Nurhasanah

Permintaan Meningkat, Ilmuwan Kembangkan Teknologi Transgenik



Produksi akuakultur yang meningkat dalam sepuluh tahun terakhir mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian mengenai peningkatan pertumbuhan ikan. Saat ini teknik pengembangan gen *Growth Hormone* (GH) menjadi teknik yang sedang berkembang pesat di dunia termasuk di Indonesia. Teknologi ini sudah berkembang sejak lama di Cina sekitar tahun 1980 oleh Prof. Zhu. Saat itu teknologi ini meniru teknik transfer gen pada tikus yang mengalami pertumbuhan cepat.

Menilik tingginya kandungan protein yang terdapat pada ikan serta permintaan ikan yang semakin meningkat, hal tersebut melatar belakangi perkembangan teknologi transgenesis. Perbaikan pada tingkat pertumbuhan ikan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produksi perikanan tersebut.

Teknologi Transgenik sudah mulai berkembang sejak tahun 1980 di Cina dengan menggunakan komoditas ikan koki, pada saat itu gen yang disisipkan berasal dari tikus karena masih belum ditemukan gen yang berasal dari ikan. *Growth hormone* (GH) umumnya digunakan sebagai gen target yang ditransferkan pada sistem ini. Teknik transfer gen saat ini merupakan metode yang cepat dan efektif untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ikan.

Penelitian mengenai teknik transfer gen ini berkembang sejak tahun 2011 di Indonesia, Teknik ini dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan pada ikan. Selain dapat memicu pertumbuhan, over-ekspresi gen GH juga dapat mempengaruhi tingkat metabolisme, kemampuan berenang pada ikan, ketahanan terhadap penyakit, tingkat konsumsi pa-

kan dan kebiasaan makan, serta respon terhadap predator.

Gen GH yang ditransferkan pada ikan mengalami pertumbuhan hingga empat kali lebih cepat dibandingkan dengan ikan non transgenik. Ada pula yang dapat mencapai pertumbuhan tujuh kali lebih cepat, namun masih memiliki banyak kekurangan, seperti gonad (red-kelenjar kelamin) pada ikan yang tidak berkembang dengan baik. Pertumbuhan ikan yang meningkat ini, dibanding lurus dengan konsumsi pakan yang dimakan oleh ikan.

Ikan transgenik umumnya mengonsumsi pakan lebih banyak, tetapi hal yang menjadi sorotan adalah proses pemanfaatan pakan yang diberikan juga lebih efisien. Hal ini disebabkan pakan yang dimakan oleh ikan disimpan di otot, sehingga hanya sedikit pakan ikan yang terbuang keperairan. Sedangkan secara tidak langsung melalui hormon insulin seperti *Growth Factor-I* (IGF-I) mampu meningkatkan retensi protein dan tingkat absorpsi dari pakan yang diberikan. Kondisi inilah yang dapat meningkatkan tingkat reduksi nitrogen di perairan.

Sekitar 64-89% nitrogen pakan yang tidak dimakan oleh ikan, akan terbuang keperairan. Limbah nitrogen tersebut seperti ammonia dan nitrit karena sangat berbahaya untuk ikan. Sehingga Transfer gen GH ini menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk memodifikasi metabolisme ikan, karena sekitar 69% dapat meningkatkan reduksi nitrogen selama hidupnya di perairan dibandingkan dengan ikan non-transgenik. Proses konversi pakan ikan transgenik juga tergolong lebih efisien karena dapat mencapai hingga 35% lebih tinggi dibanding non transgenik, sama halnya dengan

pertumbuhan bobot yang mencapai hingga 75% lebih berat.

Di samping itu beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari teknologi ini juga masih memiliki dampak negatif, menurut pemaparan dari Dr. Alimuddin, dosen Fakultas perikanan IPB (8/12), ikan transgenik lebih menguasai makanan dibandingkan dengan wild type di alam, mengingat ikan transgenik yang lebih rakus. Kondisi ini tentu akan menjadi permasalahan yang besar bagi keseimbangan ekosistem sendiri dan bahkan ikan *wild type* pun terancam punah.

Ia mengatakan dalam proses pelepasan ikan transgenik ke alam perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti ikan yang dilepas harus dibuat steril terlebih dulu, karena apabila tidak steril generasi dari ikan tersebut bisa saja semua transgenik. Begitu pula, ketika ikan tersebut akan disebarluaskan dengan tujuan konsumsi perlu melalui beberapa tahap pengujian, baik dari kadar komposisi proksimat tubuh, uji toksitas, uji kadar glukosa darah ikan transgenik, keamanan terhadap lingkungan dan sebagainya.

"Ikan yang saat ini sudah dapat dikomersilkan ialah ikan salmon. Sedangkan ikan lainnya yang terdapat di Indonesia masih dalam tahap kelengkapan data, agar masyarakat awam tidak merasa takut untuk mengonsumsi ikan transgen," ujar Dr. Alimuddin.

Komoditas transgenik yang sudah berkembang di Indonesia di antaranya ialah ikan nila dan ikan mas di Balai Besar Perikanan Budidaya (BBPAT) Sukabumi, serta udang windu di Maros yang tahan terhadap penyakit.

Sifa Fauziah G
Ilustrasi: Alice Fajri

BELILEPI

Termurah, Terlengkap, Bergaransi Resmi



MOUSE VOTRE USB



Rp 12.000

FD SANDISK 8 GB



Rp 32.000

MICRO SD V-GEN 8 GB



Rp 25.000

PRINTER



Rp 630.000

PENJUALAN

- LAPTOP/NETBOOK/NOTEBOOK, PC
- AKSESORIS LAPTOP/PC
- SPAREPART LAPTOP/PC
- SMARTPHONE
- NETWORKING
- KAMERA DIGITAL

MENERIMA JASA

- RECOVERY DATA
- INSTALASI
- SERVICE BERBAGAI PERMASALAHAN LAPTOP DAN ELEKTRONIK LAINNYA

PB ASUS 10.000 mAh



Rp 270.000

COOLER BIGFAN



Rp 30.000

HDD EXTERNAL HITACHI



Rp 780.000

NB ASUS X200MA 11.6"



Rp 3.050.000

MODEM GSM ZTE MF112



Rp 140.000

JOYSTICK DOUBLE GETAR USB



Rp 55.000

MOUSE WIRELESS E-YOTA



Rp 40.000

085716477591 29833CC0 / 7CAB6A80 www.belilepi.com

Telp : 0251-8620692 / 085716477591 / 08561121545

Jl. Babakan Tengah (BaTeng) No 102, Kampus IPB Dramaga BOGOR.